

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, A. 2013. Reformasi Birokrasi Dalam Praktik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Ali, Zainudin 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amin, Fakhry. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten : Sada Kurnia Pustaka.
- Antariksa, Bambang. 2017. Penerapan Hierarki Peraturan PerundangUndangan Dalam Ketatanegaran Indonesia. *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1*.
- Arifin. 2015. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 3.
- Aridhayandi, M. Rendi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.4*.
- Arnedi Nurristi, Dinartika dkk. 2021. *Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan Pembangunan Jalan Tol Berbasis Sustainable Development*. Dalam Jurnal JIAP Vol 7. No 3
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2016. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi)
- Burhan, Wirman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- David, Violeta Meicelya. 2020. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran terhadap Konvensi CEDAW. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Damayanti, Komang Mila. dan Deli Bunga Saravistha. 2022. Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Dalam Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Vo; 16 No 2.
- Dista Anggraeni, dan Novi Damayanti. 2022. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, dalam *Jurnal Indigenous Knowledge Volume 1 Number 2*.
- Dinanti, Dinda. dan Yuliana Yuli W. 2017. *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak*

*Asasi Manusia*. Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Agus Purnomo. 2021. Lutfiana Dwi Mayasari M.H., M.SI, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*. (Malang: PT. Cita Intrans Selaras).

Pratiwi, Endang. Jeremy Bentham's. 2022. Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination, dalam *Jurnal Konstitusi Volume 19 Nomor 2*.

Fauzia, A dkk. 2023. Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems, *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2)

Goesniadhie, Kusnu. 2020. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media).

Hariyanto, Eko. 2022. Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah, dalam *Jurnal Ensiklopedia Education Review Vol. 4 No 2*

Hidayat, Eko. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Huda, Ni'matul. 2021. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia: Bandung.

Hidayat, Eko. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Harahap, dkk. 2023. Protection And Enforcement Of Human Rights, dalam *International Journal of Students Education 2.1*.

Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang. Bayumedia)

Irfani, Nurfaqih. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3*.

Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. (Yogyakarta: PT Kanisius)

Indra, Perdana. 2016. Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara, dalam *Jurnal Warta Edisi : 47*.

- Irwansyah dan Ali Marwan Hsb. 2023. Problematika Pembatasan Calon Kepala Desa, *Grondwert Jurnal Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi negara Vol.2 No. 2*.
- Kelsen, Hans. 2019. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory of Law)*. (Bandung : Nusamedia).
- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*. Dalam *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol.5 No.1*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Mahendra, A.A. Oka. 2014. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*.
- Marzuki, Laica. 2016. *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, Setjen MK: Jakarta.
- MD, Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Muchtar, Henni. 2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Humanus Vol. XIV No.1*.
- Muhammad Fiki dan Sunny Ummul. 2022. Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1*
- Mariyadi, By. 2024. Dalam artikel updesa.com "Bolehkah Anak Kades jadi Perangkat Desa?"
- Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khalfani Mazin. 2023. Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Muhtadi. 2022. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2*.
- Putra, Yongky Haswarna. 2015. Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia (Establishment Of Regional Legal Products Based Human Right), *Skripsi Universitas Jember*.
- Prayitno, Suko. 2017. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, dalam *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2*.

- Putri Alysia Syahda Aristawati, & Rindiana Ulis Wati. 2023. Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal ndigenous Knowledge: Volume 1 Number 2*.
- Redaksi Pustaka Makmur, *UUD 1945 dan Amandemen*, edisi Reshuffle, Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Rahma, Nabila Luthvita. 2020. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pengemisan, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1*
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. (Depok: PT Raja Grafindro Persada)
- Rahaditya dkk. 2023. Sinkronisasi Vertikal Dan Horizontal PP No.46 Tahun 2015 Terhadap Permenaker No.4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua, dalam *Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol. 1, No. 1*.
- Sayuna, Inche. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret*.
- Sadewo, Hafiz Andi. 2015. Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif, *Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*.
- Setya, Hariski Romadona. 2023. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang.
- Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1*. diakses November 26, 2023.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta. Raja Grafindo Persada).
- Sumiarni, Endang. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Yogyakarta: UAYJ Press).
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika)

- Sugiarto, Umar Said. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soegiyono. 2015. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. (Mitra Wacana Media: Jakarta).
- Setiawan, D. B. 2018. Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang Undangan Pada Tingkat Daerah, dalam *Jurnal Soumatera Law Review Vol 1 Nomor 1*.
- Sommaliagustina, Desi. 2022. Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol.01 No. 02*
- Susanti, Usi. 2022. Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, Dalam *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 2, No. 2*.
- Tim Permata Pres. 2012. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Thooriq, Faridha Ath. 2023. Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan), dalam *Jurnal Gema Keadilan Volume 10 Edisi 3*.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2016. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis* (Jakarta: Pancuran Tujuh).
- Warjiyati, Sri. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Dalam *Jurnal Justicia Islamica Volume 15, Nomor 1*.
- Yasir, Armen. 2014. *Hukum Perundang-undangan*. (Bandar Lampung: Justice Publisher)
- Yusuf, Asep Warlan. 2015. Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), *Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Wardiono, Kelik. 2015. "Pure Theory of Law–Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi, (2015) hal. 67
- Wiratraman, Herlambang P. 2024. "The Judiciary and Human Rights Constitutionalism", Dalam *Jurnal International Human Rights and Local Courts*. Routledge.

- Wari Martha Kambu, dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Dalam Jurnal Lex Et Societatis s Vol. IX, No. 1.*
- Zein, Mochamad Adam Fahreza. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Membentuk Produk Hukum Dari Pemerintah Daerah.* Dalam Jurnal Seminar Nasional- Kota Ramah Hak Asasi Manusia Vol. 1.
- Zia, Halida dkk. 2020. Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, dalam *Datin Law Jurnal Vol 1 Nomor 2.*

### **Webside**

1. <https://updesa.com/bolehkah-anak-kades-jadi-perangkat-desa/>
2. <282141-perlindungan-hukum-atas-hak-hak-tersangk-cacb1dde.pdf> (<neliti.com>)
3. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

### **Undang – Undang**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Tentang Hukum Adat
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. UUD No. 26 tahun 2000 Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa